
PENGUATAN CIVIL SOCIETY BAGI DEMOKRASI INDONESIA

Ignatius Ismanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang

ignatius.ismanto@uph.edu

Abstrak

“Generasi Melek Politik di Tengah Tantangan Demokrasi” merupakan tema kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan bagi komunitas Gereja Kristen Indonesia (GKI) Perumahan Citra, Bitung, Tangerang. Kegiatan PkM ini merupakan bentuk pendidikan politik bagi warga komunitas gereja GKI Citra, khususnya dalam memahami perkembangan politik dewasa ini. Warga komunitas gereja GKI merupakan salah satu elemen dari kekuatan masyarakat. Dalam perkembangan demokrasi, kehadiran kekuatan masyarakat (*civil society*) merupakan salah satu unsur yang diperlukan bagi kelangsungan demokrasi. Perubahan politik Indonesia sejak 1998 memang telah membuka momentum perkembangan *civil society*. Namun, perubahan politik tu juga telah diikuti kecenderungan meningkatnya persaingan politik yang mengeksploitasi sentiment primordial (ikatan etnis, suku dan agama). Politisasi sentiment primordial dipandang sangat berpotensi memecah-belah kekuatan masyarakat. Kegiatan PkM ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat tentang tantangan bagi penguatan civil society di tengah persaingan politik yang mencemaskan itu. Metode kegiatan PkM ditempuh melalui “forum pembelajaran” dengan menarik keterlibatan kalangan aktivis gereja. Kegiatan PkM ini didukung oleh kalangan mahasiswa serta sejumlah tenaga pengajar Universitas Pelita Harapan, diselenggarakan secara *online* dan diikuti oleh 30 peserta pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, Jam 18.00-20.00 WIB. Kegiatan PkM ini yang melibatkan kalangan aktivis gereja ini memberikan inspirasi bagi mereka dalam memperkuat kehidupan menggeraja, serta semangat membangun kohesi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kata kunci: civil society, sentiment primordial, dan demokrasi

PENDAHULUAN

Civil society (kekuatan masyarakat) merupakan istilah yang relative baru dalam wacana politik di Indonesia. Kalangan Ilmu-Ilmu Sosial semakin menyadari bahwa kehadiran *civil society* merupakan aspek yang sangat diperlukan bagi perkembangan demokrasi (Diamond, 2004). Bahkan, *civil society* dipandang sebagai elemen yang penting bagi kelangsungan demokrasi. *Civil society* dalam pengertian yang sedarhana merupakan wadah kegiatan atau organisasi yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu karakteristik dari *civil society* ini adalah sifat otonomi (kemandirian) yang dimilikinya. Sebagai organisasi yang otonom, *civil society* bukan-lah organisasi yang dibentuk oleh negara. Sejumlah kalangan akademik memandang bahwa kehadiran *civil society* diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara. *Civil society* yang bersifat *inclusive*, membuka ruang bagi kebebasan serta menjunjung toleransi merupakan pilar kekuatan demokrasi. *Civil society* merupakan sarana bagi masyarakat dalam mewujudkan sistem sosial yang harmoni. Gagasan *civil society* juga dipandang sangat diperlukan untuk membebaskan diri dari cengkeraman atau hegemoni negara. Hegemoni dan intervensi negara terhadap kekuatan-kekuatan yang berkembang dalam masyarakat hanya akan melemahkan daya kreasi dan kemandirian mereka. (Fitria dan Sutrisnowati; Effendi, Yulianto dan Prihantika, 2019). Armando (2021) menjelaskan bahwa *civil society* yang “berintegritas, kritis dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti kekuatan bisnis-kapital dan politik sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan kekuasaan”.

Perubahan politik yang mengakhiri regim otoritarian pada 1998 dipandang sebagai momentum yang penting bagi perkembangan *civil society* (Nordhold, 2008). Perubahan politik yang mendorong transisi demokrasi itu telah membuka kembali bagi kebangkitan *civil society*. Sesungguhnya, *civil society* telah memiliki akar yang kuat dalam perkembangan politik di Indonesia. Meskipun demikian, perubahan politik sejak reformasi politik itu juga bukanlah tanpa tantangan. Alasan utama yang menjadi perhatian bagi penyelenggaraan kegiatan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) ini adalah bahwa kecenderungan perubahan politik akhir-akhir ini dipandang berpotensi melemahkan kekuatan-kekuatan masyarakat yang telah berkembang. Perubahan politik selama dua dasawarsa ini memang telah mendorong perubahan politik yang sangat dramatis. Perubahan politik itu telah mendorong kelembagaan institusi-institusi politik yang demokratis, seperti: gagasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat hingga sistem pemilu dan kepartaian yang semakin terbuka. Perubahan politik telah membuka persaingan politik yang semakin tajam. Namun, persaingan politik yang akhir-akhir ini dilakukan dengan memobilisasi sentiment etnis, suku, dan agama –sangatlah berpotensi memecah belah kekuatan-kekuatan yang berkembang dalam masyarakat. Kalangan elit-elit politik telah membajak reformasi politik. Mereka lebih senang mengeksploitasi sentiment suku dan agama dalam menghadapi persaingan politik yang semakin tajam. Mobilisasi sentiment agama dalam persaingan politik telah mempertajam polarisasi dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, upaya untuk mendorong penguatan

civil society sangat diperlukan, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Warga kominulitas gereja GKI Citra merupakan salah satu elemen dari *civil society*. Komunitas gereja ini tinggal di daerah pemukiman atau perumahan di wilayah pinggiran kota Jakarta. Pemukiman daerah pinggiran itu umumnya merupakan wilayah yang secara ekonomi berkembang cepat, serta menjadi daya tarik bagi pendatang baru dengan latar belakang yang multi-etnis. Komunitas gereja umumnya merupakan keluarga-keluarga muda. Kehidupan mereka-pun tak luput dari hingar binger perkembangan politik, serta menyaksikan kecenderungan menguatnya politik identitas, serta fenomena meluasnya radikalisme agama. Mereka memandang bahwa politik identitas serta radikalisme agama telah berpotensi memicu perpecahan dalam masyarakat. Mereka sangat membutuhkan pemahaman tentang perkembangan politik. Mereka-pun sering bertanya-tanya mengapa isu politik identitas serta gerakan radikalisme itu semakin menguat di tengah perubahan politik akhir-akhir ini. Dalam situasi ini, kegiatan PkM ini diselenggarakan untuk mengisi kebutuhan itu.

PkM ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran politik bagi warga komunitas gereja GKI Citra dalam menyikapi perubahan dan tantangan politik Indonesia. Sehubungan dengan itu, seminar dan diskusi menjadi metode yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan itu. Kegiatan PkM ini sekaligus menjadi sarana pendidikan politik warga dalam memperkuat *civil society* -yang kehadirannya sangat diperlukan bagi kelangsungan demokrasi.

METODE

Gagasan untuk membangun kesadaran berdemokrasi bagi komunitas warga GKI Citra ini dilakukan melalui forum pembelajaran. Kegiatan forum pembelajaran itu dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan tentang Demokrasi dan Civil Society. Sehubungan dengan itu, seminar dan diskusi disampaikan oleh sejumlah narasumber yang semuanya merupakan tenaga pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang. Seminar dan diskusi itu diharapkan memberikan pengetahuan dasar tentang wawasan demokrasi, sikap inklusif dan toleransi. Disamping itu, forum pembelajaran itu juga dilengkapi dengan simulasi permainan dan kuis yang dirancang untuk memberikan pengalaman konkrit dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Kegiatan simulasi permainan dan penyelenggaraan kuis ini didukung oleh keterlibatan sejumlah mahasiswa Universitas Pelita Harapan.

Penyelenggaraan kegiatan PkM ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk membangun kesadaran berbangsa khususnya bagi komunitas gereja GKI Citra, Bitung-Tangerang. Pemahaman mereka tentang wawasan dan nilai-nilai demokrasi, yaitu: sikap *inclusive*, pengakuan terhadap keaneka-ragaman (etnis, suku, dan agama) sebagai kekayaan bangsa, serta sikap toleransi dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik – menjadi isu yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, komunitas warga yang tergabung dalam forum pembelajaran dipandang sebagai sarana yang strategis bagi penguatan *civil society*. Penggalangan

kekuatan-kekuatan strategis ini dirintis melalui penyelenggaraan seminar dan *talk show*.

Acara *talk show* dengan tema “Generasi Melek Politik” diselenggarakan dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran dalam membangun sosial harmoni, memberikan pengetahuan bagi komunitas warga di tengah tantangan perubahan politik Indonesia dewasa ini, khususnya tentang wawasan kebangsaan, sikap inklusif dan toleran. Acara *talk show* dapat dipandang sebagai forum pembelajaran bagi masyarakat warga. Sebagai forum pembelajaran, acara *talk show* ini dirancang dengan menarik keterlibatan kalangan aktivis dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendiskusikan peluang dan tantangan perubahan sosial-politik dewasa ini, khususnya dalam memperkuat *civil society*. Disamping itu, forum pembelajaran itu juga akan dilengkapi dengan simulasi permainan dan kuis yang dirancang untuk memberikan pengalaman konkrit dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Kegiatan simulasi permainan dan penyelenggaraan kuis didukung oleh keterlibatan sejumlah mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Sabtu, 21 Mei 2022 Jam 18.00-20.00 diselenggarakan kegiatan PkM secara online. PkM dengan tema Penguatan *Civil Society* bagi Demokrasi ini diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang bekerjasama dengan Gereja GKI Perumahan Citra, Bitung Tangerang. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar dan talks show

yang menghadirkan 4 (empat) pembicara, yaitu: Ignatius Ismanto, Richard Daulay, Gusti Patading dan Kamel Hebron Simatupang. Talk show dipandu oleh Priscilla Meidy dan Abel Silalahi. Acara talk show dilakukan secara online dengan menggunakan platform zoom. Acara talk show diikuti oleh 30 peserta dari kalangan aktivis gereja GKI Citra, Bitung-Tangerang serta diikuti sejumlah aktivis dari denominasi gereja yang berkembang di sekitar wilayah Tangerang.

Ada-pun materi yang disampaikan dalam diskusi itu, meliputi: (i) pengertian tentang Civil Society, (ii) Transisi Demokrasi dan Kebangkitan Civil Society di Indonesia, serta (iii) Politik Identitas.

(i) *Civil Society*

Civil society dipandang sebagai elemen yang penting bagi demokrasi. Bahkan demokrasi yang stabil hanya dimungkinkan melalui kehadiran civil society yang kuat. Apakah civil society itu dan mengapa civil society memungkinkan dapat berkembang hanya dalam sistem demokrasi - merupakan sejumlah pertanyaan awal untuk mendalami pemahaman tentang civil society. Larry Diamond (2003) mendefinisikan civil society sebagai “*the entire range of organized groups and institutions that are independent of state, voluntary, at least to some extent -self generating dan self-reliant*”. Civil society merupakan organisasi sosial dan institusi yang memiliki karakteristik tertentu. Dari definisi itu, ada sejumlah karakteristik tertentu dari civil society itu, yaitu: (i) tidak tergantung pada negara (*independent of state*), (ii) dibentuk secara sukarela (*voluntary*), dan (iii) mampu menggerakkan aktivitas-

aktivitas bagi anggotanya (*self-generating*). Organisasi sosial yang dibentuk negara dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara, dan karenanya kelangsungan organisasi sosial itu menjadi sangat tergantung pada negara, -dipandang tidak memiliki karakteristik sebagai civil society. Pengertian *independent of state* juga tidak berarti mengambil sikap menentang negara. Sifat sukarela (*voluntary*) juga berarti bahwa civil society menghindari penggunaan cara-cara pemaksaan, apalagi menggunakan intimidasi dan ancaman kekerasan fisik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Civil society juga tidak berorientasi mencari profit atau keuntungan material. Civil society karena itu berbeda dengan perusahaan bisnis yang berorientasi untuk mencari profit. Civil society tercermin dari berbagai organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi non pemerintah (NGO) yang bergerak diberbagai sektor, seperti: buruh, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sebagainya.

Philippe Schmitter sebagaimana dikutip dalam Hadiwinata (2005) menjelaskan karakteristik dari civil society, yaitu: (i) otonom, (ii) aksi kolektif, (iii) tidak berpretensi merebut kekuasaan, dan (iv) tunduk pada aturan main. Sifat otonom' sebagaimana dimaksud oleh Schmitter itu dapat diartikan bahwa organisasi-organisasi sosial memiliki kebebasan relative dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam sistem politik yang demokratis, inisiatif berkembangnya organisasi-organisasi kemasyarakatan muncul dari kesadaran masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan sifat otonom dari civil society. Berbeda dengan dengan sistem politik

yang otoriter, negara memainkan peran yang menentukan dalam menggerakkan dan mengatur organisasi sosial kemasyarakat itu. Dalam sistem politik yang otoriter, civil society sangat tergantung pada negara. Dari karakteristik itu, Schmitter juga menegaskan bahwa civil society pada hakekatnya berbeda dengan partai politik. Partai politik karena itu dipandang bukanlah civil society. Partai politik dibentuk untuk memperebutkan kekuasaan politik. Sedangkan civil society dibangun tidak untuk memperebutkan kekuasaan. Civil society mungkin saja dapat menjalin komunikasi dengan partai-partai politik, namun civil society harus menghindari dari perangkap kepentingan partai politik yaitu hanya sebagai sarana mobilisasi dukungan politik. Civil society merupakan upaya kolektif dalam memperjuangkan nilai-nilai atau kepentingan mereka bersama. Civil society juga dituntut untuk menghormati dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

Civil society juga menjadi elemen yang diperlukan dalam mendukung kelangsungan demokrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Diamond (2004) bahwa kehadiran civil society memberikan kontribusi yang besar dalam memperjuangkan nilai-nilai dalam kehidupan demokrasi, yaitu: penghormatan terhadap hak-hak individu, toleransi serta pengakuan terhadap keberagaman masyarakat. Gagasan itu sekaligus menyimpulkan bahwa berkembangnya civil society dimungkinkan melalui perubahan politik yang demokratis.

(ii) Proses Demokratisasi

Berakhirnya regim otoritarian Orde Baru dipandang sebagai

momentum yang penting bagi kebangkitan kembali civil society di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa civil society akan sulit berkembang dalam lingkungan sistem politik yang otoriter. Demikian pula, kecenderungan menguatnya karakteristik otoritarianisme dalam sistem politik Indonesia semasa regim Orde Baru kurang membuka peluang bagi berkembangnya civil society yang otonom. Berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berkembang dalam masyarakat umumnya dihadapkan pada tantangan yang sama, yaitu ruang yang terbatas untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Berbagai regulasi dan aturan yang dibentuk oleh pemerintah dirancang untuk mengontrol aktivitas organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan itu. Organisasi sosial kemasyarakatan yang aspirasi atau kepentingannya dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah dibubarkan oleh pemerintah. Dalam sistem politik otoriter, pengorganisasian dan pengaturan organisasi-organisasi kemasyarakatan itu dikenal dengan sebutan *state corporatism*. Dalam mekanisme *state corporatism*, kehadiran organisasi-organisasi kemasyarakatan itu bila perlu dapat dibentuk oleh pemerintah. Keberadaan dan kelangsungan organisasi-organisasi kemasyarakatan itu sangat tergantung pada ketaatan mereka terhadap regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah. Regim otoritarian Orde Baru cenderung menempuh cara-cara *coersive* (pemaksaan) dalam mengendalikan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat (MacIntyre, 1994). Dalam *state corporatism*, organisasi kemasyarakatan itu lebih merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan masyarakat daripada

sebagai wahana bagi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Pengendalian aspirasi dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat melalui *state corporatism* pada masa regim Orde Baru dirancang untuk menjaga stabilitas politik sebagai prasyarat yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi masa itu.

Semasa regim otoritarian Orde Baru, misalnya, hanya ada satu organisasi buruh yang diakui oleh pemerintah yaitu SPSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia). Namun, kehadiran organisasi buruh ini sesungguhnya tidak pernah dipimpin oleh kalangan aktivis buruh yang dipilih oleh kalangan buruh. Organisasi buruh ini selalu dipimpin oleh kalangan pejabat sipil atau-pun militer yang diprosesnya sangat ditentukan oleh pemerintah. Organisasi buruh pada masa regim otoritarian Orde Baru, karenanya, sulit berkembang menjadi organisasi yang otonom, dan keberadaannya lebih merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan gerakan buruh yang dikawatirkan dapat mengganggu kegiatan investasi dan ekonomi nasional.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi dapat mengganggu stabilitas nasional lainnya juga dikendalikan oleh cara yang sama. Kehadiran dan keberadaan mereka dikontrol (dikendalikan) oleh pemerintah. Mereka sulit diharapkan menjadi *civil society* yang otonomi dan karenanya melemahkan kehidupan demokrasi. Perubahan politik pasca regim otoritarian Orde Baru telah melemahkan praktek-praktek *state corporatism* dalam mengendalikan berbagai kepentingan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan politik Indonesia pasca Orde Baru telah membuka peluang bagi kebangkitan kembali civil society.

(iii) ***Politik Identitas dan Gerakan Radikalisme***

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada 1997 dipandang sebagai *blessing in disguise* bagi perubahan politik Indonesia. Krisis ekonomi melemahkan legitimasi kekuasaan Orde Baru serta membuka peluang bagi kebangkitan civil society untuk mengakhiri regim otoritarian serta mendorong transformasi politik yang demokratis. Indonesia mengalami perubahan politik yang dramatis sejak 1999. Sejumlah perubahan penting yaitu: reformasi TNI yang mengakhiri keterlibatan militer dalam persiangan politik (*day by day politics*), reformasi pemerintahan yang sentralistik dengan mendorong kebijakan otonomi daerah, sistem pemilu dan sistem kepartaian yang lebih terbuka. Namun, perubahan politik yang dramatis itu dipandang belum membawa perubahan yang berarti bagi penguatan demokrasi. Perubahan politik masih demikian rentan terhadap praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan. Praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan (korupsi) merupakan tantangan bagi civil society. Salah satu fungsi dari kehadiran civil society adalah ikut mencegah penyalah-gunaan kekuasaan.

Kebangkitan civil society merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong pendalaman proses demokrasi. Praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan merupakan faktor yang melemahkan demokrasi. Civil society dituntut tanggung-jawab sosialnya untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan. Proses rekrutmen politik yang tidak sehat dipandang sebagai menjadi salah satu pemicu yang

menyuburkan praktek-praktek korupsi itu. Perubahan politik yang dramatis sejak melemahnya sistem politik yang otoritarian telah membuka persaingan politik yang semakin tajam. Persaingan politik yang semakin tajam diikuti fenomena maraknya penggunaan politik uang (*money politics*), dan karenanya biaya politik semakin mahal. Dukungan kapital menjadi aspek yang semakin penting dalam persaingan politik yang semakin kompetitif itu. Sat hal yang menarik bahwa persaingan politik yang semakin tajam itu juga diikuti fenomena kesulitan pendanaan yang dihadapi partai-partai politik dalam membiayai kegiatan mereka (Mietzner, 2013). Perubahan politik yang dramatis sejak berakhirnya kekuasaan Orde Baru, yang diikuti oleh persaingan politik yang tajam justru semakin mendorong menguatnya fenomena politik kartel (Ambardi, 2009) atau politik oligarkhi (Robison dan Hadiz, 2004). Kartel politik berbeda dengan koalisi politik. Kartel lebih merupakan pengelompokan partai-partai politik untuk meminimalisir perbedaan antar partai, sedangkan koalisi partai merupakan pengelompokan partai-partai karena persamaan ideologi. Ambardi menjelaskan fenomena perilaku kartel lebih dipicu oleh kepentingan partai politik untuk memperoleh sumber rente yang bersifat illegal. Partai berkepentingan untuk dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan. Kementerian merupakan jabatan strategis yang memiliki peluang untuk mendapatkan sumber rente. Sehubungan dengan itu, merupakan tantangan bagi civil society untuk memberikan selalu perhatian terhadap praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan – sebagai bagian dalam menjaga kelangsungan

demokrasi.

Aspek lain dari perubahan politik yang dramatis yaitu meningkatnya persaingan politik, serta antusiasme keterlibatan masyarakat pada umumnya (*grass-root*) dalam mendukung persaingan politik di tengah biaya politik yang mahal. Ironisnya, persaingan politik yang semakin tajam serta biaya politik yang semakin mahal itu telah diikuti oleh mobilisasi sentimen primordial dalam memperebutkan sumber-sumber daya. Perubahan politik sejak 1999 semakin dicirikan menguatnya politik identitas. Politik identitas yaitu memobilisasi sentiment suku dan agama dalam persaingan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Mobilisasi sentiment suku, seperti dalam konflik etnis di Kalimantan pada 2001 hingga mobilisasi sentiment agama, seperti dalam persaingan pilkada DKI Jakarta pada 2017– merupakan faktor yang hanya melemahkan civil society. Ironisnya, partai politik yang seharusnya berfungsi menyederhanakan konflik yang berkembang dalam masyarakat, justru menjadi sumber pemicu konflik dengan menggunakan symbol-simbol primordial, terutama suku dan agama dalam persaingan untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik. Persaingan politik yang memanfaatkan identitas etnis (suku dan agama) yang dikenal dengan sebutan politik identitas dapat dipandang sebagai potensi yang dapat mengoyak keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat politik Indonesia dituntut untuk menutup peluang bagi partai-partai politik yang selama ini cenderung mengusung politik identitas. Terlebih dalam perubahan politik Indonesia pasca Orde Baru yang semakin dicirikan oleh menguatnya politik kartel atau oligarkhi, partai-partai politik akan

cenderung lebih merupakan sarana untuk mengamankan kepentingan bisnis daripada sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Saatnya bagi civil society untuk bangkit dan waspada terhadap elit-elit partai yang mengusung politik identitas untuk kepentingan sempit, yaitu menjadikan organisasi sosial kemasyarakatan hanya sebagai pengumpul suara. Politik identitas berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Transisi demokrasi juga telah membuka peluang bagi kebangkitan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Mereka memanfaatkan keterbukaan dan kebebasan politik yang dimungkinkan oleh transisi demokrasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol agama dalam memaksakan kepentingannya. Faqih (2021) menjelaskan bahwa gerakan radikalisme menjadi ancaman bagi demokrasi bila gerakan itu cenderung mengabaikan aturan hukum yang berlaku atau main hakim sendiri, mentolerir penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan gagasan dan kepentingannya, serta menimbulkan ketakutan di ruang publik. Gerakan radikalisme cenderung mengabaikan toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Perjuangan mereka juga seringkali mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Gerakan sosial radikal yang memaksakan kehendak dan menolak cara-cara yang digunakan pihak atau kelompok lain dalam memperjuangkan nilai dan kepentingannya, karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kelompok radikal itu, bahkan kelompok radikal itu menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum dalam memperjuangkan

kepentingannya – lebih merupakan perusak demokrasi. Negara-pun dituntut bertindak tegas untuk menegakkan aturan hukum serta mengambil tindakan terhadap gerakan radikal itu. Gerakan radikalisme dapat dipandang sebagai potensi ancaman yang menggerogoti kekuatan-kekuatan yang berkembang dalam masyarakat. Radikalisme merupakan ancaman bagi kebangkitan *civil society* di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan hubungan negara-masyarakat, demokrasi yang stabil dimungkinkan oleh kehadiran negara yang kuat dan *civil society* yang tangguh. Hofner dalam Voragen (2007, hal. 742) menegaskan hubungan negara dan masyarakat itu dipandang bersifat *mutual reinforcement*, dimana “for a society to be civilized it needs a strong liberal democratic state; for a state to be democratic it needs civil society”. Sehubungan itu, negara yang kuat merupakan negara yang efektif dalam melindungi hak-hak bagi setiap warga negara, serta menegakan aturan hukum. Sedangkan *civil society* yang tangguh merupakan kekuatan-kekuatan masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan, serta toleran terhadap keragaman masyarakat Indonesia yang pluralistik. Keragaman etnis (suku, agama serta latar belakang budaya) bukanlah ancaman bagi demokrasi. Keragaman justru menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan *civil society* yang tangguh dalam menjaga kelangsungan demokrasi.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM yang dilakukan melalui seminar dan talk show dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan politik warga di tengah perubahan politik yang tidak menentu. Pendidikan

politik warga dipandang sebagai cara memperkuat kehadiran *civil society*, elemen yang diperlukan bagi kelangsungan demokrasi. Dalam kegiatan seminar dan talk show itu, peserta tampak antusias untuk mengikutinya. Mereka semua telah hadir di ruangan zoom sebelum jam kegiatan dimulai. Awalnya mereka menilai tema talk show seperti sangat berat dan teoritis. Namun, setelah pemaparan dan acara tanya-jawab diberikan, mereka menilai materi talks show itu sangat membantu mereka dalam memahami realitas perubahan politik akhir-akhir ini. Mereka pun semakin menyadari tantangan dari perubahan politik itu, khususnya dalam merawat keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai pengurus dan aktifis gereja, kegiatan ini memperkaya dan memberikan bekal pengetahuan mereka dalam kehidupan menggereja di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Mereka juga terinspirasi untuk mulai lebih aktif memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat inklusif, melibatkan sebanyak mungkin berbagai elemen yang berkembang dalam masyarakat mereka. Mereka terinspirasi untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi itu. Kegiatan sosial yang bersifat inklusif, menjangkau berbagai elemen masyarakat itu sebagai wujud kepedulian sosial. Mewujudkan nilai-nilai demokrasi, yaitu: toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan menjadi wahana kohesi sosial dalam merawat kebersamaan dan keberagaman -dan diyakini dapat menjadi strategi dalam menangkal meluasnya radikalisme agama serta menangkal bahaya politik identitas

Daftar Pustaka

Ambardi, Kuskridho. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Keptaraan di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia.

Diamond, Larry. (2004). What Civil Society Can Do to Develop Democracy, diunggah dari <https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/speeches/what-civil-society-can-do-develop-democracy>

Fakih, Achmad. (2021). Pembubaran FPI dalam Masa Depan Demokrasi Kita, diunggah dari <https://anotasi.com/pembubaran-fpi-dan-masa-depan-demokrasi-kita/>

Fitria, Vita dan Sri Agustin Sutrisnowati, Civil Society (tanpa tahun), Konsep Ummah, dan Masyarakat Madani, diunggah dari <https://media.neliti.com/media/publications/18095-ID-civil-society-konsep-ummah-dan-masyarakat-madani.pdf>

Hadiwinata, Bob Sugeng. (2005). Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 9, No, 1, diunggah dari [file:///C:/Users/asus/Downloads/11037-21055-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/11037-21055-1-PB%20(1).pdf)

Heni Nur Efendi, Yulianto, Ita Prihantika. (2019). “Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik: Studi WALHI Lampung”, *AdministrativA*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2019, diunggah dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/33371/1/3%20DINAMIKA%20PERAN%20CIVIL%20OCIETY%20DALAM%20RUANG%20PUBLIK%20STUDI%20WALHI%20LAMPUNG.pdf>

MacIntyre, Andrew (1994), “Organizing Interests: Corporatism in Indonesian Politics”. Working Paper No. 42.

Asia Research Center, Murdoch University.

Nordholt, Henk Schulte. (2008). “Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: an Essay”, diunggah dari <http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/view/1/59>

Voragen, Roy. (2007) Civil Society and Democracy Post Sohearto. *Melintas* 22(3), diunggah dari <https://journal.unpar.ac.id>.

Yilmaz, Ichsana dan Greg Berton. (2021). “Political Mobilisation of Religious, Chauvinist, and Technocratic Populists in Indonesia and Their Activities in Cyberspace”, diunggah dari <file:///C:/Users/asus/Downloads/religions-12-00822.pdf>

LAMPIRAN

The poster features a dark blue background with a white speech bubble containing text. At the top left is the UPH logo. A central image shows four men in suits with their names in white text boxes: Gusti Patading, Ignatius Ismanto, Richard Daulay, and Karmel Hebron S. A red and white Indonesian flag is visible in the background of the speaker photos. The event title and date are prominently displayed in the white bubble.

UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

*SPEAKERS FROM
International Relations UPH*

Gusti Patading

Ignatius Ismanto

Richard Daulay

Karmel Hebron S.

PKM CIVIL SOCIETY

**GENERASI MELEK POLITIK
DI TENGAH DEMOKRASI**

21 Mei 2022 • 18.00 WIB

*Kalau bukan kita yang memimpin
negara, lalu siapa lagi? Bandit politik?
atau Para penggiring opini?*

#AkuBukanPenerusYangTerbawaArus

zoom
bit.ly/uph-edu-zoom-us-PkM

